

2014, PU Ajukan Anggaran Rp 164 T

Oleh Eko Adityo Nugroho

► **SANUR** – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengajukan anggaran sebesar Rp 164 triliun untuk 2014. Anggaran itu dialokasikan bagi program utama (*baseline*) guna memenuhi target rencana strategis (renstra) dan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) Rp 82,40 triliun, direktif presiden Rp 34,72 triliun, dan stok program infrastruktur Rp 46,82 triliun.

"Kami akan sampaikan usulan itu kepada Bappenas dan Kementerian Keuangan, terutama untuk anggaran program utama dan direktif presiden," kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto se usai menutup acara Konsultasi Regional II di Sanur, Bali, Rabu (20/3).

Dari total usulan anggaran program utama, Direktorat Jenderal Bina Marga mendapat alokasi sekitar Rp 42,75 triliun, Ditjen Sumber Daya Air Rp 23,70 triliun dan Ditjen Cipta Karya Rp 15,94 triliun.

Djoko menambahkan, pihaknya tidak akan mengajukan usulan untuk stok program kepada Bappenas maupun Kemenkeu, karena program tersebut bukan prioritas. Kendati demikian, apabila Kemenkeu memberikan tambahan anggaran tahun 2014, Kementerian PU siap melaksanakan stok program tersebut.

Di sisi lain, Djoko menilai program konferensi regional (konreg) tahun ini lebih baik dibandingkan konreg tahun sebelumnya. Itu karena ada dua kali konreg yang dilakukan, yak-

ni 26-27 Februari dan 19-20 Maret 2013. Dua kali penyelenggaraan ini membuat ada koordinasi dengan pemerintah daerah terkait pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan. Dengan begitu, proyek pemerintah pusat dan daerah tidak ada yang bertabrakan.

"Konreg ini lebih efektif dan efisien untuk menajamkan program tahun 2014. Selain diadakan dua kali dan ada waktu koordinasi, penajaman program ini sudah berdasarkan kebutuhan wilayah dan rencana tata ruang," tutur dia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Djoko Murjanto memperkirakan, kebutuhan pembiayaan untuk penyelenggaraan jalan sepanjang 2014 sebesar Rp 88,79 triliun. Rincian itu terdiri atas program *baseline* Rp 42,75 triliun, inisiatif baru Rp 20,83 triliun, dan stok program Rp 25,20 triliun.

"Kebutuhan dana itu sudah dibahas bersama pemerintah daerah dalam program penajaman pembangunan infrastruktur jalan. Namun

begitu, ada beberapa program penyelenggaraan jalan yang bisa dikerjakan dengan mudah, membutuhkan upaya kerja keras, dan sulit dikerjakan, terutama bangun jalan tol," tutur dia.

Di tempat yang sama, Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Muhammad Hasan mengungkapkan, pihaknya membutuhkan anggaran sebesar Rp 44,49 triliun yang terdiri atas anggaran program utama Rp 23,70 triliun, direktif presiden Rp 6,93 triliun, dan stok program Rp 13,84 triliun.

Program-program yang akan dibangun di antaranya pembangunan waduk, embung, dan situ guna memperkuat ketahanan air. Program lain adalah pembangunan irigasi sebagai pendukung ketahanan pangan serta program pengendali banjir dan bencana gunung berapi.

Sementara itu, Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Imam S Ernawi mengungkapkan, anggaran untuk program utama diusulkan sebesar Rp 15,94 triliun, direktif presiden Rp 6,95 triliun, dan stok program senilai Rp 7,77 triliun. Dengan demikian, total kebutuhan dana Ditjen Cipta Karya mencapai Rp 30,67 triliun.

Imam menambahkan, pihaknya berkomitmen untuk mengerjakan pembangunan infrastruktur direktif presiden. Program itu meliputi air bersih untuk daerah rawan air, pulau kecil/terpencil, dan kawasan perbatasan; air bersih dan sanitasi untuk masyarakat miskin perkotaan dan kampung nelayan; serta penanganan-penanganan kawasan permukiman perbatasan dan penyediaan fasilitas umum/fasilitas sosial (fasum/fasos).